

ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO AGRIBISNIS: STUDI KASUS UMKM SEPTI ENG CAKE DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Analysis of Agribusiness Micro-Enterprise Financing: A Case Study of UMKM Septi Eng Cake in South Bangka Regency

Garist Sekar Tanjung¹, Aisa Rahma Utami^{2*}, Siska Floresita³, Meinita Nadia Putri⁴, Kanasha Anandyta⁵, Rosalia⁶, Anita⁷

^{1,2*,3,4,5,6,7} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung,
Jl. Raya Balunijuk, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33125

*Email korespondensi: aisarahmautami@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the financing patterns of a micro-scale agribusiness enterprise, Septi Eng Cake, a home-based cake and bakery UMKM located in South Bangka Regency. The research was conducted through in-depth interviews and direct observation. The results show that the primary financing source relies entirely on self-owned capital exceeding Rp30,000,000, which is consistent with the Pecking Order Theory proposed by Myers and Majluf (1984). The enterprise has accessed a government assistance program from the local Department of Cooperatives (DKUKMindag) of South Bangka Regency worth Rp1,000,000, using a Nomor Induk Berusaha (NIB) as the primary requirement. However, it has not yet accessed formal financial institutions such as KUR (People's Business Credit). The main obstacles include the absence of structured financial records, limited knowledge of formal credit products, and a perceived complexity of formal loan procedures. The dominant business risk is raw material price fluctuation, which is managed through proportional selling price adjustments. With over five years of operation and a consistent market, Septi Eng Cake has substantive eligibility for KUR Mikro but remains constrained by administrative unreadiness. This study recommends simplified financial recording, active exploration of government UMKM programs, and formal financing access to support production capacity expansion.

Keywords: *agribusiness financing, micro enterprise, Pecking Order Theory, South Bangka, UMKM,*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pola pembiayaan usaha mikro agribisnis pada UMKM Septi Eng Cake, yaitu usaha rumah tangga berbasis kue dan bakeri yang berlokasi di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan utama sepenuhnya berasal dari modal sendiri senilai lebih dari Rp30.000.000, yang selaras dengan *Pecking Order Theory* yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Usaha ini pernah mengakses program bantuan pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMindag) Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp1.000.000 dengan syarat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum pernah mengakses lembaga keuangan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hambatan utama meliputi ketiadaan pencatatan keuangan yang terstruktur, minimnya pengetahuan tentang produk kredit formal, dan persepsi bahwa prosedur pinjaman formal sangat kompleks. Risiko usaha yang dominan adalah fluktuasi harga bahan baku yang diantisipasi melalui penyesuaian harga jual secara proporsional. Dengan usia usaha lebih dari lima tahun dan pasar yang konsisten, Septi Eng Cake secara substantif memenuhi kriteria KUR Mikro namun masih terkendala ketidaksiapan administratif. Penelitian ini merekomendasikan pencatatan keuangan sederhana, eksplorasi aktif program bantuan UMKM pemerintah, dan akses pembiayaan formal guna mendukung ekspansi kapasitas produksi.

Kata kunci: Bangka Selatan, *Pecking Order Theory*, pembiayaan agribisnis, UMKM, usaha mikro

PENDAHULUAN

Sektor agribisnis memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena mampu menyediakan pangan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perkembangannya, agribisnis tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya pertanian, tetapi juga mencakup sektor pengolahan hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu bentuk pengembangan agribisnis pada sektor hilir adalah usaha pengolahan pangan yang berkembang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk makanan siap konsumsi. Kondisi tersebut menjadikan usaha di bidang pengolahan pangan sebagai salah satu peluang usaha yang banyak dikembangkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Badan Pusat Statistik, 2023).

Keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek permodalan dan pembiayaan usaha, yang menyebabkan pelaku usaha sulit meningkatkan kapasitas produksi maupun mengembangkan usahanya secara lebih luas (Fitrian, *et al.* 2019).

Permasalahan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Sebagian besar usaha mikro masih mengandalkan modal pribadi atau keuntungan usaha yang diputar kembali sebagai sumber pembiayaan utama. Kondisi ini sejalan dengan *Pecking Order Theory* yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984), yang menjelaskan bahwa pelaku usaha cenderung menggunakan sumber pembiayaan internal terlebih dahulu sebelum beralih ke pembiayaan eksternal. Keterbatasan modal internal seringkali menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya secara optimal (Wagiswari & Sitorus, 2024).

Untuk mendorong perkembangan UMKM, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan pembiayaan, baik melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan hibah, maupun bantuan modal usaha. Menurut Nurholis *et al.*, (2020) dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan modal sangat penting bagi UMKM, khususnya bagi usaha mikro yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal. Dengan adanya bantuan modal, pelaku usaha dapat mempertahankan keberlangsungan usaha serta meningkatkan kapasitas produksinya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Salah satu UMKM yang bergerak pada sektor pengolahan pangan adalah Septi Eng Cake, yaitu usaha mikro skala rumah tangga yang memproduksi berbagai jenis kue dan produk bakery berdasarkan pesanan konsumen. Usaha ini dijalankan dengan modal terbatas dan masih mengandalkan pembiayaan internal, sebagaimana karakteristik umum usaha mikro di Indonesia (Myers & Majluf, 1984). Di samping itu, usaha ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan usaha, dan pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Meskipun demikian, usaha ini tetap mampu bertahan melalui pengelolaan usaha secara mandiri serta dukungan bantuan modal dari pemerintah, yang menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha mikro tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan modal, melainkan juga oleh kemampuan pengelolaan usaha itu sendiri (Wulandari *et al.*, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, kunjungan ke usaha Septi Eng Cake bertujuan untuk memahami secara langsung praktik pengelolaan pembiayaan usaha mikro agribisnis serta peran bantuan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan UMKM (Feryanto, 2017). Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pola dan sumber pembiayaan yang digunakan oleh UMKM Septi Eng Cake dalam menjalankan usahanya; (2) mengidentifikasi akses pembiayaan yang dimiliki UMKM, baik melalui program bantuan pemerintah maupun lembaga keuangan formal, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh pembiayaan tersebut; (3) menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan yang diterapkan dengan teori pembiayaan usaha, khususnya *Pecking Order Theory*; dan (4)

merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha melalui perbaikan pengelolaan keuangan serta pemanfaatan sumber pembiayaan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditetapkan pada UMKM Septi Eng Cake yang berlokasi di Jalan Keposang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa UMKM tersebut merupakan usaha pengolahan pangan berbasis kue dan bakeri yang telah beroperasi selama lebih dari lima tahun dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pembiayaan usaha. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi terhadap kegiatan produksi dan pengelolaan usaha, serta dokumentasi yang meliputi profil usaha, produk, peralatan produksi, dan dokumen legalitas usaha. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola pembiayaan, sumber modal, hambatan akses pembiayaan, serta strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM Septi Eng Cake.

Data primer diperoleh langsung dari pemilik UMKM Septi Eng Cake melalui panduan wawancara semi-terstruktur yang mencakup aspek profil usaha, sumber dan struktur pembiayaan, prosedur pengajuan bantuan, pengelolaan keuangan, serta risiko dan kendala pembiayaan. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM agribisnis di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan kondisi aktual pembiayaan usaha, kemudian mengaitkannya dengan teori dan konsep pembiayaan agribisnis yang relevan, terutama *Pecking Order Theory* (Myers & Majluf, 1984), teori aksesibilitas UMKM terhadap lembaga keuangan formal (Wahyuni *et al.*, 2021), serta teori manajemen risiko pembiayaan (Shaniyazova, 2016). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan literatur pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM Septi Eng Cake

Septi Eng Cake merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang industri produk roti dan kue. Usaha ini didirikan pada Januari 2019 dan berlokasi di Jl. Keposang, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam menjalankan usahanya, Septi Eng Cake fokus memproduksi berbagai jenis kue tradisional dan kue kering yang dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Profil umum UMKM Septi Eng Cake disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Profil Umum UMKM Septi Eng Cake

Keterangan	Deskripsi
Nama Perusahaan	Septi Eng Cake
Alamat Perusahaan	Jl. Keposang, Kabupaten Bangka Selatan
Bidang Usaha	Industri Produk Roti dan Kue
Tahun Berdiri	Januari 2019
Jumlah Karyawan	2 (Dua) Orang
Bentuk Badan Usaha	Usaha Perseorangan (UMKM)
Skala Usaha	Mikro (Kecil)
Legalitas	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Berdasarkan Tabel 1, Septi Eng Cake termasuk usaha berskala mikro dengan jumlah tenaga kerja yang masih terbatas, yaitu 2 orang karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana serta dikelola langsung oleh pemilik usaha. Bentuk usaha perseorangan dipilih karena lebih fleksibel dalam pengelolaan

operasional dan sesuai dengan kapasitas usaha yang masih berkembang. Meskipun belum berbadan hukum seperti CV atau PT, Septi Eng Cake telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha yang memberikan manfaat dalam hal kemudahan mengikuti program pembinaan UMKM, memperoleh bantuan pemerintah, serta mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

Struktur Organisasi dan Manajemen

Septi Eng Cake belum memiliki struktur organisasi formal seperti pembagian divisi produksi, keuangan, maupun pemasaran. Seluruh kegiatan usaha masih dikelola langsung oleh pemilik, mulai dari menerima pesanan konsumen, menentukan jadwal produksi, membeli bahan baku, mengatur penggunaan modal usaha, hingga melakukan pengawasan terhadap hasil produksi kue. Pemilik juga terlibat langsung dalam proses pembuatan produk seperti pengadukan adonan, pemanggangan, dan pengemasan ketika jumlah pesanan meningkat.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, dua orang karyawan membantu pada bagian produksi, terutama dalam proses penyiapan bahan, pencetakan adonan, pengemasan, dan pembersihan peralatan setelah produksi selesai. Pembagian kerja dilakukan secara langsung oleh pemilik sesuai jenis produk dan jumlah pesanan yang masuk. Sistem kerja yang diterapkan masih bersifat sederhana dan fleksibel karena produksi dilakukan berdasarkan sistem *pre-order* (PO). Pengelolaan keuangan usaha juga masih dilakukan langsung oleh pemilik tanpa adanya pencatatan yang dibagi kepada karyawan, sehingga seluruh pengelolaan usaha masih terpusat pada pemilik sebagai pengendali utama kegiatan produksi dan keuangan usaha.

Sumber dan Struktur Pembiayaan

Pembiayaan merupakan nyawa bagi keberlangsungan suatu usaha. Tanpa sumber permodalan yang memadai, usaha tidak dapat menjalankan proses produksi, apalagi melakukan ekspansi. Dalam teori keuangan, terdapat berbagai sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha, mulai dari modal sendiri, pinjaman bank, lembaga keuangan non-bank, investor, hingga program bantuan pemerintah (Wahyuni *et al.*, 2021). Sumber dan struktur pembiayaan UMKM Septi Eng Cake secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sumber dan Struktur Pembiayaan Septi Eng Cake

No.	Sumber Pembiayaan	Nilai / Keterangan	Status
1.	Modal Sendiri	Lebih dari Rp30.000.000	Aktif (Utama)
2.	Program Bantuan Pemerintah (Basel/DKUKMindag)	Rp1.000.000 (syarat: NIB)	Pernah Diakses
3.	Kredit Perbankan (KUR, dll.)	-	Belum Diakses
4.	Lembaga Keuangan Non-Bank	-	Belum Diakses
5.	Investor / Mitra Modal	-	Tidak Ada

Septi Eng Cake menetapkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama dengan nilai lebih dari Rp30.000.000. Modal ini digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan baku, pembayaran upah karyawan, perawatan peralatan, hingga biaya pemasaran. Keputusan untuk mengandalkan modal sendiri merupakan pilihan yang disengaja oleh pemilik untuk menghindari beban bunga dan risiko gagal bayar kepada lembaga keuangan.

Selain modal sendiri, Septi Eng Cake juga pernah menerima bantuan dari pemerintah melalui program bantuan UMKM dari DKUKMindag Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp1.000.000. Program ini diakses dengan persyaratan yang relatif sederhana, yakni memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengantarkan berkas pengajuan ke kantor Dinas UMKM setempat. Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening pemilik dengan waktu pencairan sekitar satu bulan setelah pengajuan diverifikasi. Mokalu *et al.*, (2018) menegaskan bahwa legalitas dasar berupa NIB merupakan pintu masuk paling fundamental bagi UMKM untuk mengakses program-program dukungan pemerintah.

Belum diaksesnya kredit perbankan formal menunjukkan bahwa usaha masih mengandalkan modal internal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Feryanto (2017) yang menyatakan bahwa sebagian besar usaha mikro agribisnis masih mengalami keterbatasan

dalam mengakses lembaga keuangan formal. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh persyaratan administrasi yang dianggap rumit, keterbatasan agunan, serta rendahnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perbankan. Ketergantungan pada modal sendiri memang mencerminkan tingkat kemandirian usaha yang cukup baik, namun di sisi lain dapat menyebabkan keterbatasan modal dalam pengembangan skala usaha.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Septi Eng Cake belum pernah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank umum, BPR, koperasi simpan pinjam, maupun lembaga pembiayaan lainnya. Pembiayaan eksternal yang pernah diterima hanya berasal dari program bantuan DKUKMindag Kabupaten Bangka Selatan dengan nominal sebesar Rp1.000.000. Prosedur pengajuan bantuan yang dilakukan tergolong sederhana dibandingkan prosedur kredit perbankan formal dan mencakup empat tahapan sebagai berikut.

Pertama, persiapan legalitas usaha. Pemilik memastikan usaha telah memiliki NIB sebagai syarat utama administrasi. Kedua, pengumpulan dan penyerahan dokumen. Pemilik menyiapkan fotokopi KTP dan data usaha sederhana, kemudian mengantarkan langsung ke kantor Dinas UMKM tanpa melalui sistem online. Ketiga, tahap verifikasi oleh dinas terkait. DKUKMindag melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memastikan usaha benar-benar aktif berproduksi, tanpa survei kelayakan yang rumit seperti analisis laporan keuangan, pemeriksaan agunan, ataupun analisis kelayakan kredit menggunakan prinsip 5C. Kondisi tersebut berbeda dengan prosedur pembiayaan formal di perbankan yang umumnya lebih kompleks (Fitriani *et al.*, 2019). Keempat, pencairan dana bantuan. Dana ditransfer langsung ke rekening pemilik usaha dalam waktu sekitar satu bulan sejak dokumen diajukan.

Pemilik usaha mengaku belum pernah mencoba mengajukan pinjaman ke bank karena menganggap prosedurnya cukup rumit dan membutuhkan banyak persyaratan administrasi. Selain itu, usaha ini belum memiliki pencatatan keuangan yang terstruktur sehingga pemilik merasa belum siap untuk memenuhi persyaratan bankable. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Ashari, (2009) yang menyatakan bahwa minimnya kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Meskipun demikian, kondisi ini membuat usaha relatif aman dari risiko cicilan dan bunga pinjaman, namun di sisi lain membatasi kemampuan usaha untuk melakukan ekspansi produksi dalam skala yang lebih besar.

Pengelolaan Keuangan

Sistem pengelolaan keuangan pada UMKM Septi Eng Cake masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang terstruktur. Seluruh aktivitas keuangan usaha masih diatur langsung oleh pemilik, mulai dari penerimaan hasil penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, hingga pengeluaran operasional seperti gas, listrik, dan kebutuhan produksi harian. Usaha ini juga belum memiliki laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, maupun neraca usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan masih bersifat tradisional dan lebih mengandalkan pengalaman pemilik dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran usaha. Menurut Ashari, (2009) sebagian besar UMKM agribisnis di Indonesia masih mengalami kelemahan dalam pencatatan keuangan karena keterbatasan pengetahuan administrasi dan rendahnya penggunaan sistem akuntansi sederhana.

Arus kas usaha berjalan berdasarkan sistem *pre-order* (PO) sehingga pendapatan dari hasil penjualan langsung digunakan kembali untuk membeli bahan baku produksi berikutnya. Sistem perputaran modal seperti ini membuat usaha tetap dapat berjalan tanpa tambahan modal dari pihak luar. Namun, karena tidak adanya pencatatan yang jelas, pemilik mengalami kesulitan dalam mengetahui jumlah keuntungan bersih yang diperoleh pada setiap periode produksi. Kondisi serupa juga dijelaskan oleh Tambunan, (2019) bahwa UMKM skala mikro umumnya hanya berfokus pada kelancaran produksi tanpa melakukan perhitungan laba secara rinci.

Septi Eng Cake juga belum melakukan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Sebagian pendapatan usaha masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga modal usaha sering bercampur dengan pengeluaran pribadi. Rahayu, (2016) menjelaskan bahwa pencampuran keuangan usaha dan rumah tangga menjadi salah satu penyebab

UMKM sulit berkembang karena pemilik tidak dapat mengetahui kondisi modal usaha yang sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan cadangan dana yang cukup untuk menghadapi peningkatan permintaan secara mendadak, sehingga pemilik harus mengatur kembali jadwal produksi sesuai kemampuan modal yang tersedia.

Septi Eng Cake juga belum memiliki perencanaan keuangan jangka panjang seperti penyisihan keuntungan untuk investasi alat produksi, dana darurat, maupun pengembangan usaha. Menurut Shaniyazova, (2016), minimnya perencanaan keuangan pada UMKM dapat menyebabkan usaha sulit melakukan pengembangan kapasitas produksi dan lebih rentan terhadap risiko usaha. Apabila usaha ingin berkembang dan mengakses pembiayaan formal seperti KUR, pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur perlu mulai diterapkan agar usaha dinilai lebih layak oleh lembaga keuangan.

Risiko dan Kendala Pembiayaan

Dalam konteks pembiayaan agribisnis, terdapat berbagai jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh pelaku usaha, antara lain risiko gagal bayar (*default risk*), risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko fluktuasi harga bahan baku, dan risiko pasar (Shaniyazova, 2016). Profil risiko yang dihadapi oleh Septi Eng Cake relatif lebih sederhana dibandingkan usaha yang memiliki kewajiban kepada lembaga keuangan formal. Karena tidak memiliki pinjaman kepada lembaga keuangan formal, Septi Eng Cake tidak terpapar pada risiko gagal bayar dan risiko suku bunga.

Kendala utama yang dirasakan Septi Eng Cake terkait pembiayaan adalah fluktuasi harga bahan baku. Bahan baku utama dalam pembuatan kue, seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, dan santan, merupakan komoditas yang harganya dipengaruhi oleh faktor musiman, kebijakan impor, dan dinamika pasar global. Kenaikan harga bahan baku secara langsung menekan margin keuntungan usaha apabila harga jual produk tidak segera disesuaikan. Strategi yang diterapkan adalah menyesuaikan harga jual produk secara proporsional, yang merupakan bentuk transfer risiko dari produsen ke konsumen yang lazim diterapkan pada usaha mikro dengan daya tawar rendah di pasar. Effendy *et al.*, (2018) menemukan bahwa strategi penyesuaian harga jual merupakan mekanisme adaptasi yang paling umum diterapkan oleh usaha mikro pengolahan pangan dalam merespons gejolak harga input.

Risiko lain yang dihadapi Septi Eng Cake berkaitan dengan keterbatasan modal usaha. Ketergantungan terhadap modal sendiri menyebabkan kemampuan pengembangan usaha menjadi terbatas, terutama dalam pengadaan peralatan produksi dengan kapasitas lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan modal internal memang mampu mengurangi risiko utang, tetapi juga membatasi peluang ekspansi usaha dalam jangka panjang (Simatupang *et al.*, 2019). Pemilik juga mengakui bahwa kondisi inflasi dan kenaikan harga umum berdampak pada daya beli konsumen, meskipun hingga saat kunjungan dilakukan, dampak tersebut masih dapat dikelola dengan penyesuaian strategi harga dan efisiensi dalam penggunaan bahan baku.

Analisis Keterkaitan dengan Teori Pembiayaan Agribisnis

***Pecking Order Theory* dalam Keputusan Pembiayaan**

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan perilaku pembiayaan Septi Eng Cake. Teori yang dikembangkan oleh Myers & Majluf (1984) ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengutamakan sumber pembiayaan internal terlebih dahulu, kemudian menggunakan utang apabila modal internal tidak mencukupi, dan menjadikan pendanaan eksternal sebagai pilihan terakhir. Wagiswari & Sitorus (2024) mengkonfirmasi relevansi teori ini dalam konteks UMKM agribisnis di Indonesia dengan menemukan bahwa sebagian besar UMKM memilih modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama bukan semata-mata karena ketidakmampuan mengakses sumber eksternal, tetapi juga karena adanya preferensi untuk mempertahankan independensi finansial dan menghindari risiko yang muncul dari kewajiban pinjaman. Temuan ini sepenuhnya konsisten dengan pola pembiayaan yang diterapkan oleh Septi Eng Cake, yang menggunakan modal pribadi lebih dari Rp30.000.000 sebagai sumber utama dan belum memanfaatkan kredit perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun investor eksternal dalam pengembangan usahanya.

Aksesibilitas UMKM terhadap Lembaga Keuangan Formal

Ketiadaan akses Septi Eng Cake terhadap lembaga keuangan formal mencerminkan fenomena

yang lebih luas dalam ekosistem UMKM agribisnis di Indonesia. Fitriani *et al.*, (2019) mengidentifikasi setidaknya lima faktor penghambat akses UMKM terhadap kredit formal, yaitu: (1) ketidakmampuan menyediakan agunan yang memadai; (2) tidak adanya laporan keuangan yang terstruktur; (3) prosedur pengajuan kredit yang dianggap rumit dan memakan waktu; (4) ketidaktahuan mengenai produk-produk kredit yang tersedia; dan (5) persepsi negatif terhadap bunga bank. Septi Eng Cake menghadapi setidaknya tiga dari lima faktor penghambat tersebut. Kondisi ini menjadi alasan mengapa usaha ini belum memanfaatkan produk pembiayaan formal seperti KUR, meskipun secara substantif usaha ini telah berjalan selama lebih dari lima tahun dan memiliki omzet yang konsisten.

Peran Program Pembiayaan Pemerintah

Pengalaman Septi Eng Cake dalam mengakses program bantuan dari DKUKMindag Kabupaten Bangka Selatan merupakan bukti nyata bahwa program-program pembiayaan non-perbankan dari pemerintah dapat menjangkau usaha mikro yang belum bankable. Wibowo *et al.*, (2018) menekankan bahwa program pembiayaan pemerintah seperti KUR dan berbagai program hibah/bantuan memiliki peran strategis dalam memberdayakan UMKM yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal konvensional. Moku et al., (2018) menemukan bahwa kepemilikan NIB secara signifikan meningkatkan peluang UMKM untuk mengakses program-program bantuan pemerintah. Namun demikian, nilai bantuan yang diterima sebesar Rp1.000.000 masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan modal usaha yang sesungguhnya. Ashari, (2009) mengingatkan bahwa besaran bantuan yang tidak proporsional dengan skala kebutuhan pembiayaan usaha seringkali menjadikan program bantuan pemerintah hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas produksi UMKM.

Manajemen Risiko Berbasis Penyesuaian Harga

Septi Eng Cake menghadapi risiko usaha yang paling dominan berupa fluktuasi harga bahan baku produksi. Pemilik usaha menerapkan strategi penyesuaian harga jual produk ketika terjadi kenaikan harga bahan baku. Dalam kajian manajemen risiko agribisnis, langkah tersebut termasuk bentuk adaptasi terhadap risiko pasar (*market risk*). Shaniyazova, (2016) menjelaskan bahwa usaha mikro agribisnis umumnya memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga bahan baku sehingga penyesuaian harga jual menjadi cara yang paling realistis untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Kenaikan harga produk yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen dan meningkatkan persaingan dengan usaha sejenis, sehingga pelaku usaha juga perlu melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan mengurangi pemborosan produksi.

Refleksi dan Harapan Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Septi Eng Cake, pemilik lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan pengembangan usaha secara besar-besaran. Pemilik usaha berfokus menjaga kualitas produk, mempertahankan pelanggan, dan memastikan proses produksi tetap berjalan secara stabil. Pemilik usaha berharap adanya dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan sarana produksi dan pendampingan usaha. Bantuan berupa oven berkapasitas besar, mixer industri, maupun pelatihan pengelolaan keuangan dinilai lebih bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan bantuan dana dalam jumlah kecil yang sifatnya sementara. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Wibowo *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa dukungan fasilitas produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kapasitas usaha mikro secara lebih berkelanjutan.

Keterbatasan informasi mengenai program pembiayaan dan bantuan UMKM juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro. Nurholis *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa rendahnya akses informasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan UMKM belum optimal memanfaatkan program pembiayaan pemerintah. Pemilik Septi Eng Cake juga menyampaikan bahwa keberhasilan usaha memerlukan proses, ketekunan, dan konsistensi dalam menjalankan usaha. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan UMKM, khususnya dalam menghadapi keterbatasan modal dan risiko usaha sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola pembiayaan UMKM Septi Eng Cake sepenuhnya berasal dari modal sendiri, yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha sejak berdiri. Akses pembiayaan yang dimiliki masih terbatas pada bantuan pemerintah yang diperoleh melalui kepemilikan NIB, sementara akses terhadap lembaga keuangan formal belum dimanfaatkan karena kendala administrasi, terutama belum adanya pencatatan dan laporan keuangan yang memadai. Praktik pembiayaan yang diterapkan sejalan dengan *Pecking Order Theory*, yaitu mengutamakan sumber dana internal dibandingkan pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pengelolaan keuangan melalui pencatatan usaha yang lebih terstruktur serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur pembiayaan formal agar akses terhadap sumber pembiayaan eksternal dapat terbuka dan mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemilik UMKM Septi Eng Cake yang telah bersedia menerima kunjungan dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk keperluan penelitian ini, serta kepada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Kelautan, Universitas Bangka Belitung atas dukungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, A. (2009) 'Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1), pp. 21–42. <https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42>.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Statistik Karakteristik Usaha 2022/2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [BPS – Statistik Karakteristik Usaha 2022/2023](https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42).
- Effendy, Ellyta & N, Muhammad & Romano, Romano & Safrida, Safrida. (2019). Analisis Struktur Biaya Produksi Dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 3. 360-375. [10.21776/ub.jepa.2019.003.02.12](https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.12).
- Feryanto (2017) 'PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAN PETANI: ANALISA DATA MAKRO', *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(2), pp. 291–357. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/agricore.v2i2.15145>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023) *Perkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Percepat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. [Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](https://doi.org/10.24198/agricore.v2i2.15145).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2022) *Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. [Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia](https://doi.org/10.24198/agricore.v2i2.15145).
- Mokalu, O. J., Montolalu, J., & Keles, D. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua). *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 6(001). <https://doi.org/10.35797/jab.v6.i001.%p>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Nurholis, M.S., Anwarudin, O. and Makhmudi, M. (2020) 'KAPASITAS PETANI PADI DALAM MENGAKSES KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT', *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 15(1), pp. 53–72. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.51852/-v15i1.432>.

- Rahayu, L. (2016) “Aksesibilitas Petani Bawang Merah Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan”, *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(1), pp. 52–60. doi: [10.18196/agr.118](https://doi.org/10.18196/agr.118).
- Shaniyazova, Z. (2016) ‘THE CONSTRAINTS OF AGRICULTURAL CREDIT AND GOVERNMENT POLICY STRATEGY’, *International Scientific Journal*, 105(1), pp. 288–292. Available at: <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.01.105.19>.
- Simatupang, H & Purwanti, L & Mardiaty, E. (2019). Determinants of capital structures based on the Pecking Order Theory and Trade-off Theory. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 23. [10.26905/jkdp.v23i1.2579](https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2579).
- Tambunan, Tulus. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*. 9. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Wagisuwari, K & Sitorus, MM. (2024). Analisis Trade-Off Theory dan Pecking Order Theory Terhadap Struktur Modal. *Owner*. 8. 2380-2392. [10.33395/owner.v8i3.2091](https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2091).
- Wahyuni, Sri & Gunawan, Endro & Suhartini, Sri & Sinuraya, Julia & Syukur, Mat & Ilham, Nyak. (2021). DINAMIKA KREDIT PROGRAM DAN PERSPEKTIF SKEMA BARU KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK PEMBIAYAAN PERTANIAN 2020-2024. *Forum penelitian Agro Ekonomi*. 38. 103. [10.21082/fae.v38n2.2020.103-117](https://doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.103-117).
- Wibowo, B & Rifin, A & Kuswanto, S. (2018). Efisiensi Penyaluran Kredit Ritel Komersial Terhadap Sektor Umkm di BRI (Studi Kasus di BRI Kantor Wilayah Jakarta 3). *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. 4. 308. [10.17358/jabm.4.2.308](https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.308).
- Wulandari E, Meuwissen MPM, Karmana MH, Lansink AGJMO (2021) The role of access to finance from different finance providers in production risks of horticulture in Indonesia. *PLoS ONE* 16(9): e0257812. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257812>